

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Penulis
TEMA : Reformasi Indonesia Pasca Soeharto : Dari BJ Habibie sampai Abdurrahman
SURAT KABAR/MAJALAH : Suara Pembaruan

Hari **Senin** Tanggal **23** Bulan **Agustus** Tahun **2001** Halaman **9** Kolom **1**

RINGKASAN

Indonesia sejauh ini belum berhasil keluar dari krisis ekonomi di Asia, yang di mulai pada 1997. Indonesia bersama Korea Selatan dan Thailand, menurut data resmi IMF, mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar., yang tingkat GDP masing-masing negara (Indonesia, Thailand Korea Selatan) pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar -14,1 persen, -10,8 persen dan -6,7 persen. Thailand dan Korsel telah berhasil keluar dari krisis ekonomi, sedangkan Indonesia masih tetap terpuruk, mencemaskan, dan diliputi ketidakpastian, suatu hal yang dikhawatirkan mengancam transisi dari otoriterisme menuju demokrasi. Indonesia pasca-Soeharto, di bawah era BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, belum berhasil melakukan konsolidasi demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*), guna melakukan pemutuan yang tajam (diskontinuitas) secara sistemik dengan rezim orde baru dalam upaya mewujudkan stabilisasi ekonomi-politik agar bisa keluar dari krisis.

CATATAN :

Dari BJ Habibie sampai Abdurrahman Wahid

Oleh Vishnu Juwono dan Herdi Sahrasad

Indonesia sejauh ini belum berhasil keluar dari krisis ekonomi di Asia, yang dimulai pada 1997. Indonesia, bersama Korea Selatan dan Thailand, menurut data resmi IMF, mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar, yang tingkat GDP masing-masing negara (Indonesia, Thailand, Korea Selatan) pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar -14,1 persen, -10,8 persen dan -6,7 persen. Thailand dan Korsel telah berhasil keluar dari krisis ekonomi, sedangkan Indonesia masih tetap terpuruk, mencemaskan, dan diliputi ketidakpastian, suatu hal yang dikawatirkan mengancam transisi dari otoriterisme menuju demokrasi.

Dewasa ini, situasi ekonomi-politik Indonesia relatif kian memburuk dengan kenaikan harga BBM 30 persen, dan tarif dasar listrik sekitar 20 persen, yang ditandai pula dengan maraknya aksi-aksi protes-demonstrasi mahasiswa dan kaum buruh yang sering diwarnai kerusuhan serta serangkaian ledakan bom dan granat. Situasi politik saat ini kian merosot akibat pertentangan antara Presiden Abdurrahman Wahid (yang menganut sistem presidensial) dan DPR/MPR (yang menekankan sistem parlementer), menyusul dikeluarkannya Memorandum I dan II oleh DPR, yang akan diteruskan dengan Sidang Istimewa MPR. Ini merupakan krisis konstitusional, suatu kemacetan konstitusional.

Era Habibie

Pada saat menggantikan Presiden Soeharto, Mei 1998, posisi Presiden BJ Habibie amat lemah. Habibie mendapat perlawanan dari oposisi di luar parlemen amat keras, sesudah itu juga harus menghadapi manuver-manuver dari kubu nasionalis maupun tentara dalam tubuh Golkar, yang ingin menyingkirkannya melalui Sidang Istimewa MPR. Mandat reformasi dan demokrasi disuarakan secara tegas oleh oposisi di luar parlemen dan mahasiswa.

Habibie mempunyai hubungan yang relatif renggang atau bahkan buruk dengan kalangan tentara (TNI) -terutama yang dikenal dengan sebutan kubu nasionalis (Merah-Putih)- semasa ia menjabat Menristek/Ketua Umum ICMI. Tentu kita tidak lupa, kalangan tentara cukup terusik pada saat mereka dipaksa membeli pesawat-pesawat hasil produksi proyek prestisius dan mercusuar Habibie, yakni IPTN.

Akan tetapi, tanpa diduga Habibie berhasil mengonsolidasikan kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaannya. Menghadapi kalangan nasionalis dan para purnawirawan TNI di tubuh Golkar (pada saat itu belum menjadi partai), ia beraliansi dengan Akbar

Tandjung dan Wiranto untuk mendudukkan Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar dalam kongres luar biasa partai itu. Tentunya kita tidak lupa, Akbar Tandjung dapat menjadi ketua Golkar tidak lepas dari "campur tangan" Jenderal Wiranto, dengan melakukan "intervensi langsung maupun terselubung" kepada jenderal-jenderal aktif yang masih menduduki pimpinan puncak Golkar di daerah untuk mengalihkan suaranya dari Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, yang pada saat itu juga mencalonkan diri.

Habibie membuka kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Selain itu untuk menunjang reformasi politik, ia menyatakan pemerintahannya sebagai pemerintahan transisi, berjanji mengadakan pemilihan umum dengan undang-undang yang relatif lebih demokratis.

Dalam bidang ekonomi prestasi pemerintahan Habibie cukup menunjukkan hasil menjanjikan. Tim ekonomi yang dikomandani Ginandjar Kartasmita mendapat sambutan yang cukup baik dari IMF karena sebagian besar personelnya teknokrat yang cukup berpengalaman dalam birokrasi dan mempunyai relasi yang cukup baik dengan dunia keuangan internasional.

Menteri Keuangan Bambang Subianto dan Ketua BPPN Glenn S Yusuf, -diduga dekat dengan kubu "teknokrat" Orde Baru yaitu Widjojo Nitisastro-, adalah dua teknokrat yang menjadi tumpuan bagi IMF untuk melaksanakan program restrukturisasi perekonomian Indonesia. Hasilnya dapat dilihat pada upaya penyehatan bank dengan melikuidasi 38 bank swasta domestik serta membuat Bank Indonesia lebih independen sehingga tidak ada lagi *overlapping* antarfungsi moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dengan fungsi fiskal yang dijalankan oleh Departemen Keuangan.

Dalam angka statistik dapat dilihat, pada masa pemerintahan Habibie kurs rupiah menguat cukup signifikan dari kisaran Rp 17.000/dolar ke kisaran angka Rp 8.000/dolar. Selain ini bahaya hiperinflasi dapat dihindarkan dengan berhasilnya pemerintahan Habibie menekan inflasi di bawah dua digit.

Periode transisi Presiden Habibie ternodai dua peristiwa besar, yaitu masalah Timor-Timur dan Skandal Bank Bali, yang langsung memperlemah posisi politik Presiden Habibie di dalam dan luar negeri. Kedua isu menyebabkan kejatuhannya.

Skandal Bank Bali menunjukkan bahwa ternyata upaya reformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Habibie tidak maksimal. Muatan politik pada Skandal Bank Bali menjadi terlihat jelas sehubungan dengan upaya "pengalangan dana" untuk Golkar dalam rangka

menghadapi Pemilu 1999. Efek dari peristiwa Bank Bali itu adalah merosotnya kepercayaan IMF kepada pemerintah Habibie. Hal itu ditandai dengan ditundanya pencairan dana IMF pada pertengahan September 1999, akibat keengganan pemerintah Habibie menuntaskan kasus Bank Bali dengan mengumumkan hasil audit mengenai kasus tersebut yang dilakukan perusahaan akuntan publik PriceWaterhouse Coopers.

Dua kesalahan itu menjadi dasar bagi anggota MPR hasil Pemilu 1999 untuk menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie. Dengan dalih menyelamatkan bangsa dari polarisasi antara kubu Habibie dan kubu Megawati, kelompok Poros Tengah, dengan dimotori Ketua Umum PAN Amien Rais mengajukan KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden ke-4 Republik Indonesia. Dengan perolehan suara 373 dibandingkan 313 suara, Megawati, yang partinya, PDI Perjuangan memenangkan pemilu dengan meraih suara sebesar 33 persen, harus menerima kekalahan dan harus puas dengan kedudukannya sebagai wakil presiden.

Era Gus Dur

Politik di Indonesia sangat personal sifatnya, dalam pengertian figur kepemimpinan sangat menentukan situasi dan kondisi jalannya pemerintahan, sebab pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistik. Presiden Gus Dur menderita lemah penglihatan, hampir total buta, dan ketajaman intelektualnya tampak kian tidak terfokus akibat dua kali *stroke* berat yang menyimpannya sebelum berkuasa. Untuk sebagian, akibat problem penglihatan, Gus Dur memilih para menteri dan pembantu lainnya setelah memperoleh masukan dari para pembisiknya. Perilaku Gus Dur sulit diduga dan tidak teratur, *erratic*, pernyataan-pernyataan kontroversial dan ia tidak kompeten (*incompetence*) sebagai administrator, yang kesemuanya itu mengurangi kredibilitasnya sebagai pemimpin bangsa dan negara terbesar di Asia Tenggara.

Duet Gus Dur - Megawati pada awalnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pasar ditandai dengan menguatnya kurs rupiah terhadap dolar menjadi sekitar Rp 6.900 per dolar, serta meningkatnya Indeks Harga Saham Habungan di BEJ secara signifikan. Masyarakat menganggap mereka merupakan pimpinan yang dapat memutuskan hubungan (*cut off*) yang tajam dan tandas dengan masa Orde Baru sehingga akan dapat menjalankan reformasi di segala bidang secara lebih efektif. Ditambah lagi kabinet yang terbentuk menggambarkan akomodasi dari seluruh kekuatan politik yang ada, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, kekuatan Poros Tengah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan TNI, yang awalnya me-

nunjukkan kinerja yang menjanjikan.

Di bidang politik, Gus Dur mendorong dengan cepat proses supremasi sipil atas TNI dengan upayanya membubarkan Bakorstranas. Puncak dari penegakan supremasi sipil adalah pada saat Wahid berani memberhentikan figur kuat TNI Orde Baru, Jenderal Wiranto, dari jabatan Menko Polkam. Di bidang ekonomi dengan figur Kwik Kian Gie yang menjadi komandan Tim Ekuin, pasar menaruh harapan besar, walaupun masih bersikap hati-hati karena figur Bambang Sudibyo (yang belum dikenal) menduduki posisi yang amat penting, yakni Menteri Keuangan.

Sayang, pemerintahan oleh partai-partai itu diwarnai perebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penempatan Muhammad Nazief -yang tidak mempunyai pengalaman di bidang telekomunikasi-menjadi Direktur Utama PT Telkom merupakan salah satu contoh kasus kedekatan dengan penguasa, dalam hal ini presiden, menjadi pertimbangan, dibandingkan dengan kompetensi dan profesionalisme. Pengangkatan Saefudin Hasan menjadi Dirut BNI '46, sebagai sesama alumnus UGM, oleh Menteri Keuangan Bambang Sudibyo (dosen FE-UGM), juga menunjukkan usaha dari sebuah partai politik (PAN) untuk menempatkan orangnya di BUMN, yang diduga untuk menggalang dana bagi pemilu ke depan.

Klimaks dari pertarungan berebut di EUMN adalah diberhentikannya Menneq EUMN Laksamana Sukardi, kader PDI Perjuangan, dan Menperindag Jusuf Kalla, kader Golkar. Kejadian itu menunjukkan, dua departemen "basah" itu ingin dikuasai oleh presiden dengan menempatkan dua orang kepercayaannya yang tidak mempunyai pengalaman maupun kompetensi di kedua bidang tersebut, yakni Letjen TNI Luhut B Pandjaitan -berlatar belakang tentara-dan Rozy Munir, pakar di bidang demografi dan kependudukan.

Implikasi politik dari pencopotan kedua menteri itu adalah merenggangnya hubungan antara presiden (eksekutif) dan lembaga legislatif -yang dikuasai Partai Golkar, PDI-P Perjuangan dan Poros Tengah. Kemudian mendadak skandal *Buloggate* Rp 35 miliar muncul, membuat Sekretaris Pengendalian Pemerintah/Pejabat Mensesneg Bondan Gunawan mundur, menambah amunisi bagi parlemen untuk menggugat Presiden atas niatnya untuk memberantas KKN dan melaksanakan reformasi.

Skandal itu *Bruneigate* adalah kasus Presiden dianggap tidak melaporkan dana pemberian Sultan Brunei sebesar US\$ 2 miliar sebagai sumbangan kepada rakyat Aceh. Dari situ, krisis kepercayaan, krisis kredibilitas dan krisis legitimasi terhadap rezim Gus Dur mulai merebak. Sementara gangguan teror

ledakan bom dan granat, menimbulkan ketakutan di kalangan investor asing dan pasar. Aksi teror bom itu sejauh ini tidak berhasil diatasi aparat Polri dan TNI, yang menjadi beban tersendiri bagi supremasi sipil era Gus Dur.

Wewenang Wapres

Tatkala memasuki sidang tahunan MPR yang diselenggarakan pada 8-17 Agustus 2000, untuk menghindari ancaman pemberhentian (semacam *impeachment*) dari MPR, Presiden Abdurrahman Wahid menawarkan sebuah konsensi kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Konsensi itu adalah pemberian wewenang kepada Wakil Presiden Megawati untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan adanya ketentuan itu Megawati dapat memimpin rapat kabinet, membuat program dan agenda kabinet dan mengevaluasi kinerja kabinet.

Selain itu juga Megawati diberi otoritas untuk menandatangani surat-pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara, pengangkatan pimpinan militer dan perubahan departemen. Semua wewenang itu dituangkan pada Keputusan Presiden No 121 Tahun 2000. Akan tetapi, Gus Dur melanggar sendiri konsesinya itu, terutama bagi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, karena Gus Dur melakukan penghapusan wewenang Wapres untuk menyetujui dan menandatangani pengangkatan pejabat tinggi negara.

Dengan adanya tindakan presiden praktis sebagian besar kompromi yang telah disepakati pada sidang tahunan MPR tahun 2000 dilanggar oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Situasi itu makin memburuk karena Gus Dur justru lebih mendahulukan kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mengangkat Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo yang tidak lulus *fit and proper test*, juga mengangkat Menko Ekuin Rizal Ramli yang sejak lama dikenal bersikap sangat "frontal" terhadap IMF dan kurang berpengalaman secara profesional dalam birokrasi dan dalam negosiasi internasional.

Ternyata program dan kebijakan Rizal Ramli maupun Prijadi dinilai gagal. Kurs rupiah terus melemah menembus Rp 11.200-11.300 per dolar AS, sektor riil terkulai lemas, bantuan IMF sebesar US\$ 400 juta yang ditunda sejak Desember 2000 tidak kunjung diturunkan kepada pemerintahan Gus Dur dengan alasan menunggu revisi APBN. Sementara itu, struktur keuangan Indonesia yang mestinya bisa diperbaiki dengan upaya percepatan penjualan aset oleh BPPN, restrukturisasi utang swasta dan pencabutan subsidi pada barang-barang konsumsi, ternyata tidak dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan laporan World Bank Maret 2001, Indonesia hanya mampu menjual tujuh persen dari aset yang dikelola

BPPN, mewakili pemerintah. Angka itu tentu amat kecil; dibanding Thailand, Korea Selatan dan Malaysia yang masing-masing mampu menjual sebesar 70 persen, 48 persen dan 61 persen dari total aset yang dimiliki. Di sini, dalam hal restrukturisasi utang swasta terlihat, kepentingan politis masih mewarnai kebijakan itu.

Kenyataan ini mencerminkan ketidakjelasan Tim Ekuin dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi dan implementasinya. Sampai akhirnya pertengahan Juni 2001 Rizal Ramli digantikan Burhanuddin Abdullah, MA, sebagai Menko Ekuin dan Prijadi digantikan Rizal Ramli sebagai Menkeu. Lagi-lagi pergantian jabatan menteri oleh Gus Dur itu belum mampu membangkitkan kepercayaan sepenuhnya dari IMF, investor dan pelaku pasar di dalam dan luar negeri.

Sementara itu kenaikan harga BBM 30 persen memukul perekonomian rakyat. Di sisi lain, angka utang luar negeri mencapai lebih dari US\$ 150 miliar, ditambah BLBI sekitar Rp 650 triliun dan rekapitalisasi perbankan sekitar Rp 144 triliun, yang terus membebani rakyat banyak dan mencerminkan ekonomi yang tidak rasional, juga kekuasaan yang tidak bermoral yang diwariskan Orde Baru Soeharto. Di tambah akumulasi persoalan selama pemerintahan Habibie dan Gus Dur yang tidak efektif, berbau KKN dan tidak mencerminkan *good governance*, harapan pada SI-MPR untuk mengatasi multikrisis di Indonesia semakin ditambakan oleh rakyat.

Indonesia pasca-Soeharto, di bawah era BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, belum berhasil melakukan konsolidasi demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*), guna melakukan pemutuan yang tajam (diskontinuitas) secara sistemik dengan rezim Orde Baru dalam upaya mewujudkan stabilisasi ekonomi-politik agar bisa keluar dari krisis.

SI-MPR harus bisa menetapkan program kerja bagi eksekutif untuk memecahkan tantangan, gangguan dan kendala struktural-kultural yang semakin memberatkan akibat belum tegaknya *good governance*, supremasi hukum, kinerja kelembagaan yang lamban, pemerintahan yang tidak inovatif dan tidak kreatif, serta kehidupan demokrasi yang diwarnai anarki sosial dan konflik identitas (etnis, agama, komunal) dan konflik kepentingan (individu, kelompok, golongan).

◆
Penulis pertama adalah staf pengajar Program Extension FE-UI dan sedang studi pascasarjana di Columbia University, New York, AS. Sedangkan penulis kedua Direktur Freedom Foundation, aktivis PRODEM (jaringan aktivis prodemokrasi) dan peneliti independen, mantan visiting fellow Monash University, Australia dan Indiana University, AS.

INDONESIA

Di Indonesia, ketidakmampuan rezim baru untuk *deliver* dan kegagalan politisi sipil baru dalam berperan dapat memberikan kesempatan bagi kekuatan lama atau antidemokratis untuk tampil dan bahkan mendapatkan simpati pada

dakan *abuse* menjadi mudah karena konstitusi dan *rule of the game* yang berlaku masih rancu ditambah dengan institusi demokrasi yang masih lemah dan norma-norma politik yang belum sepenuhnya disepakati.

Kompetisi politik yang tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan yang memadai tersebut jelas mendominasi kehidupan politik Indonesia saat

pemilu berikutnya.

Di samping itu, proses *breakdown* juga dapat dimulai dari tindakan *abuse* atas *rule of the game* (aturan permainan) termasuk konstitusi, maupun juga norma demokrasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik itu sendiri. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh aktor-aktor politik yang termarginalisasi atau tidak sabar atas proses transisi yang sedang

ini. Keadaan itu dibiarkan dan dimanipulasi oleh hampir semua kekuatan politik yang berperan baik di eksekutif maupun legislatif hanya untuk kepentingan politik sesaat. Gejala itu kalau berlangsung terus akan sangat berbahaya atas legitimasi demokrasi Indonesia.

Kebutuhan pragmatis seperti stabilitas dan keamanan akan lebih *appeal-*

berlangsung.

Orientasi kepada kekuasaan yang mendominasi *political behaviour* (perilaku politik) aktor-aktor politik dapat mendorong mereka untuk menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk mendapatkan tujuan seperti misalnya berkolaborasi dengan kekuatan bersenjata untuk melancarkan *coup*. Memang, dalam situasi transisi, tin-

ing bagi masyarakat dan dapat mengalahkan kebutuhan luhur untuk menyelesaikan proyek besar konsolidasi demokrasi. Akhirnya, proses *breakdown* atas usaha konsolidasi demokrasi Indonesia akan terjadi karena kegagalan pemimpin politik sipil itu sendiri.



Penulis adalah aktivis politik.